

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu mempunyai fungsi sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian. Dalam sebuah penelitian, kajian terdahulu berperan sebagai tolak ukur metode penelitian dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kegunaan penelitian terdahulu dalam tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil oleh peneliti benar atau salah. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai referensi dalam penelitian ini, yaitu:



**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1.	Muhammad Fadli (2018)	Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015	Hasil penelitian jurnal ini menunjukkan fokus untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran elit lokal dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan dampak keterlibatan elit lokal terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja.
2.	Riyan Susanto (2020)	Peran Tokoh Agama Kuasa Elit Politik dalam Pilkadaes 2017 di Desa Tanjung Raja Selatan Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir	Penelitian ini menemukan bahwa elit lokal di Desa Tanjung Raja Selatan Kecamatan Tanjung Raja memiliki peran yang sangat penting dalam pemilihan kepala desa yang diselenggarakan di Desa Tanjung Raja Selatan Kecamatan

			<p>Tanjung Raja. Penelitian ini melihat bahwa masyarakat yang hanya fokus pada elit politik dan tokoh agama yang berkuasa serta masyarakat dalam memilih calon kepala desa tidak sepenuhnya menggunakan hatinya karena pengaruh dan tekanan penguasa daerah. Orang juga tergiur dengan janji dan uang serta bantuan dari orang-orang yang berkuasa di suatu daerah.</p>
3.	Enah (2017)	<p>Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017 (Studi Kasus Desa Way Galih Kecamatan Tanjung</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada tokoh agama dan adat yang memiliki pengaruh kuat terhadap pemilihan kepala desa Way Galih Kecamatan</p>

		<p>Bintang Kabupaten Lampung Selatan)</p> 	<p>Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, penelitian ini menggambarkan peran tokoh agama dalam membangun kesadaran politik di masyarakat dengan memberikan pengetahuan tentang politik kepada masyarakat. Dari pengaruh tokoh agama dan adat yang sangat signifikan tersebut berdampak pada pilihan politik masyarakat yang mengikuti tokoh agama atau adat dalam memenangkan calon kepala desa tertentu.</p>
--	--	---	---

*Sumber: Dari Berbagai Sumber*

Berdasarkan beberapa hasil dari penelitian di atas, penelitian yang dilakukan peneliti memiliki kesamaan dan keunikan tersendiri meskipun penelitiannya mempunyai topik yang sama. Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang peran elit lokal dalam pemilihan kepala daerah. Kemudian, perbedaan antara keduanya adalah penelitian Muh. Fadli, dkk fokus pada peran elit dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan dampak keterlibatan elit lokal pada kontestasi politik tingkat kabupaten sedangkan penelitian ini berfokus pada relasi kuasa antara kandidat Kepala Desa dengan elit lokal. Sementara itu, keunikan dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah untuk mempresentasikan peran elit lokal dalam pemilihan kepala daerah di tingkat desa. Selain itu, Pemilihan Kepala Desa yang diteliti Muh. Fadli terjadi pada tahun 2015, sedangkan dalam penelitian ini Pilkades yang terjadi pada tahun 2019.

Berikutnya, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Riyan Susanto yaitu meneliti kontestasi politik pada tingkat desa dan kuasa yang dimiliki tokoh lokal pada pemilihan kepala desa. Namun, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Riyan Susanto adalah tokoh yang menjadi subjek penelitian yang berfokus hanya pada tokoh agama. Sedangkan, subjek penelitian ini adalah elit lokal yang berperan dalam bidang agama, ekonomi, maupun sosial yang membantu memenangkan salah satu kandidat bernama Asep Kurniawan pada Pemilihan Kepala Desa Sukaluyu Tahun 2019.

Terakhir, Sama seperti sebelumnya penelitian Enah memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas mengenai peran tokoh

masyarakat dalam Pemilihan Kepala desa. Namun, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Enah adalah penelitian ini meneliti elit ekonomi sebagai pemodal dalam memenangkan kandidat dalam Pemilihan Kepala Desa Sukaluyu tahun 2019. Selain itu, penelitian Enah berfokus pada edukasi kepada masyarakat mengenai politik, sedangkan penelitian ini memang berfokus pada relasi kuasa elit lokal pada kontestasi politik di tingkat desa tepatnya di Desa Sukaluyu, Garut, Jawa Barat.

Penelitian yang peneliti lakukan memiliki keunikan tersendiri karena meskipun pembahasannya sama mengenai politik lokal. Namun, penelitian ini memiliki fokus dan lokus yang berbeda terutama dari objek yang akan diteliti berbeda dari penelitian terdahulu dan elit yang terlibat dalam penelitian ini lebih kompleks karena melibatkan elit ekonomi, elit sosial, dan elit agama dalam kaitannya dengan relasi kuasa. Sedangkan, lokus dalam penelitian ini adalah Pemilihan Kepala Desa Sukaluyu, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

## **2.2. Kerangka Teori**

### **2.2.1. Elit**

Definisi dari elit sendiri mempunyai arti cukup luas dan dapat dikaji dari berbagai macam perspektif, dalam ilmu sosiologi elit menandakan kelompok yang memiliki kedudukan tinggi dalam pemerintahan, politik, ekonomi, dan agama. Di dalam masyarakat terdapat dua tingkatan sosial dalam kehidupan yakni rakyat jelata dan

priyayi. Pada dasarnya, elit merupakan individu-individu yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat.

Elit jika ditempatkan dalam kekuasaan, maka ada dua jenis elit yaitu elit yang memerintah secara formal struktural dan elit yang memerintah secara informal berdasarkan struktur. Seperti yang dikatakan Pareto, dimana ia membagi kelas elit menjadi dua kelas, yaitu pertama, elit pemerintahan terdiri dari individu-individu yang secara langsung atau tidak langsung berperan besar dalam memerintah. Kedua, elite non-pemerintah. Dapat dikatakan bahwa ada dua lapisan sosial dalam masyarakat, yaitu lapisan bawah dan lapisan atas yang terbagi menjadi dua yaitu elite penguasa dan elite non-pemerintah.

Mosca dan Pareto mengklasifikasikan elit ke dalam kategori, yaitu elit penguasa, elit non-pemerintah, dan massa umum (non-elit).<sup>1</sup> Secara struktural, terdapat dua elit yang dimaksud yaitu elit fungsional dan elit politik dimana keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu elit fungsional adalah pemimpin yang baik dari masa lalu hingga saat ini karena mereka mengabdikan diri untuk melanjutkan fungsi negara dan masyarakat modern. Sedangkan, elit politik adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan politik dengan berbagai tujuan tetapi biasanya hanya terikat oleh kepentingan politik. Menurut

---

<sup>1</sup> Maurice Deverger. 1982. *Sosiologi Politik*. Rajawali: Jakarta Press. Hlm 178.

Suzanne Keller, elit politik adalah individu atau kelompok yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik, dan jika dikaitkan dengan elit lokal adalah individu yang berperan penting dalam keputusan politik di tingkat lokal.<sup>2</sup>

Dalam sistem kekuasaan, elit memiliki fondasi kekuasaan yang besar dalam suatu masyarakat dan mampu mendapatkan sebagian besar dari sistem kekuasaan. Para elit itu sendiri sebagai kelompok kekuasaan memiliki tujuan atau kepentingan dalam menggunakan kekuasaannya. Peran elit dalam struktur sosial adalah sekelompok orang yang memiliki sumber kekuasaan untuk mencapai kekuasaan. Bahkan, elit tanpa menduduki jabatan strategis dalam struktur kekuasaan tetapi dapat membantu seseorang dari kalangan masyarakat untuk memperoleh jabatan-jabatan strategis di pemerintahan.

Dalam teori elit, secara umum berisi bahwa setiap masyarakat dibagi menjadi dua kategori yang meliputi 1) sekelompok kecil orang yang memiliki kemampuan dan karena itu menduduki kekuasaan untuk memerintah. 2) sejumlah besar masyarakat ditakdirkan untuk diperintah. Dengan kata lain, elit sering diartikan sebagai kumpulan individu-individu *superior* atau memiliki kekuatan lebih untuk memerintah yang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan maupun yang sedang berkuasa.

---

<sup>2</sup> Suzanne Keller. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elite, Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hlm 87.



Pada struktur kekuasaan, Elit politik sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu elit politik lokal dan elit lokal. Elit politik lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan politik di lembaga eksekutif atau legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis di tingkat lokal. Mereka menduduki posisi politik tinggi yang dapat membuat dan melaksanakan kebijakan politik yang mereka buat. Misalnya seperti Gubernur, Walikota, Bupati, Ketua DPRD, pimpinan partai politik, dan termasuk Kepala Desa. Sedangkan, elit lokal adalah seseorang yang tidak mempunyai kedudukan struktural dalam pemerintahan tetapi mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain, dalam hal ini masyarakat. Elit lokal memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pimpinan pemerintah di tingkat lokal meskipun ia tidak memiliki jabatan politik strategis di pemerintahan. Contoh elit lokal seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, dan sebagainya. Hal itu juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Robert Dahl yang berkeyakinan bahwa “hukum besi oligarki” tidak bisa dihindari.<sup>3</sup> Sebagai tokoh berpengaruh elit biasanya akan mendorong massa menuju ke arah untuk mewujudkan kepentingannya, sehingga elit dengan mudah dapat “intervensi” kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa.

---

<sup>3</sup> Robert Dahl. 1994. *Analisa Politik Modern*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.

Karakteristik elit tentunya memiliki keahlian dalam memimpin dan menjalankan kontrol politik. Menurut Mosca, elit terbagi menjadi dua jenis, yaitu:<sup>4</sup>

- 1) Elit politik lokal adalah individu yang menduduki jabatan politik di lembaga eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis di tingkat lokal. Biasanya mereka menduduki posisi tinggi di tingkat lokal dalam membuat dan melaksanakan kebijakan.
- 2) Elit non-politik lokal adalah individu yang memiliki kedudukan yang strategis dan mempunyai pengaruh untuk mengatur masyarakat. Elit non-politik tersebut antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, dan sebagainya.

Penelitian ini sendiri berfokus pada elit lokal, dimana menurut Halim elit lokal di daerah memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab yang merupakan masalah krusial. Terdapat klasifikasi jenis elit lokal yang berada dalam lapisan masyarakat, di antaranya:<sup>5</sup>

- a. Elit Ekonomi

Elit ekonomi di daerah khususnya tingkat desa memainkan peran strategis dalam politik lokal. Elit ekonomi di tingkat lokal biasanya lebih memilih untuk berada di belakang layar atau tidak

---

<sup>4</sup> Maurice Deverger. 1982. *Sosiologi Politik*. Rajawali: Jakarta Press.

<sup>5</sup> Abdul Halim. 2014. *Politik Lokal Pola, Aktor, dan Alur Dramatikal*. LP2B: Yogyakarta. Hlm 131-158.

terlibat langsung dalam proses politik, namun elit ekonomi yang berada di luar struktur politik memainkan peran penting yaitu sebagai pengontrol kekuasaan melalui jaringan modal dan bisnis yang dimilikinya. Dengan kata lain, elit ekonomi disebut juga elit kekayaan merupakan seseorang atau tokoh yang mempunyai kekayaan atau ekonomi di atas masyarakat lainnya. Golongan elit ini dapat mencakup siapa saja selama ia memiliki kekayaan atau tingkat ekonomi (pemodal) di atas masyarakat lainnya di daerah.

b. **Elit Agama**

Elit agama yang dimaksud adalah tokoh lokal yang sangat berpengaruh dalam kegiatan politik lokal. Elit lokal sebenarnya memiliki modal sosial dan simbolik seperti tarekat, ilmu agama, dan kharisma yang menjadikan dirinya menjadi pemimpin yang dipatuhi masyarakat setempat. Kerapkali dalam sebuah Pilkada, para kandidat biasanya bersilaturahmi ke sejumlah pemuka-pemuka agama untuk meminta doa restu dan dukungan politik. Sowan politik yang dilakukan kandidat mengisyaratkan bahwa pengaruh elit agama terhadap masyarakat sangat besar. Biasanya, terdapat timbal balik antara agama di daerah dengan kebijakan politik di tingkat lokal, namun kebijakan politik juga dapat mempengaruhi aktivitas keagamaan di tingkat lokal.

Menurut Suzzane Keller, ia memasukkan elit agama ke dalam kelompok elit tradisional karena berhasil menjadi pemimpin berdasarkan tradisi atau budaya lama dimana elit tidak bisa statis dan tidak bertentangan dengan kemajuan zaman, kekuasaan elit didasarkan pada agama, tradisi, dan keluarga.<sup>6</sup>

Dengan kata lain, elit tradisional didefinisikan sebagai pemimpin agama, golongan petinggi adat, juragan tanah, dan orang-orang yang diberikan *privilege*. Dengan status elit yang diperoleh atas keturunan dan reputasi dalam sebuah masyarakat baik secara agama ataupun adat.

#### c. Elit Sosial

Elit sosial adalah tokoh yang sangat dipandang dan dihormati oleh masyarakat di daerahnya. Elit sosial mencakup banyak jenis seperti tokoh masyarakat, pemuka adat, tokoh keagamaan, komunitas seni dan budaya, serta tokoh organisasi lainnya. Elit sosial ini adalah mereka yang berada di luar struktur kekuasaan dan tidak memiliki modal atau agama untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Para tokoh masyarakat yang dimaksud tidak memiliki modal agama seperti elit agama dan modal ekonomi seperti elit ekonomi, maupun modal kekuasaan seperti elit politik. Di sisi lain, modal yang dimiliki

---

<sup>6</sup> Ibid.

oleh para tokoh masyarakat ini adalah modal sosial dan kepentingan masyarakat di akar rumput.

Kehadiran elit dalam lapisan masyarakat, menurut Keller merupakan karena dalam ruang lingkungannya selalu ada individu-individu yang memiliki kelebihan dibandingkan masyarakat pada umumnya, semakin heterogen masyarakat maka akan semakin banyak muncul elit-elit baru berdasarkan dimensi kekuasaan yang dimilikinya dimana elit sangat bergantung pada dasar munculnya kelompok tersebut atau cakupan area yang dikuasai oleh elit.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, elit lokal desa digambarkan sebagai orang yang memiliki basis sosial dan ekonomi yang kuat. Seperti elit ekonomi, biasanya memiliki kuasa atas kepemilikan tanah, juragan atau pengusaha yang memodali elit politik lokal yang didukungnya. Kemudian, elit agama dimana secara sosial memiliki kuasa atas kharismatik kepada pengikut atau murid-muridnya. Kekuasaan elit diperoleh atas kepemilikan dan pengolahan potensi tingkat lokal dalam hal ini desa mencakup sumber daya yang jumlahnya terbatas untuk memenuhi kepentingannya. Dalam konteks pemilihan kepala desa, elit lokal pasti memiliki kepentingannya sendiri terutama elit tersebut menjadi bagian dari salah satu kandidat yang memenangkan kontestasi politik tersebut.

---

<sup>7</sup> Suzanne Keller. 1984. *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: CV Rajawali.

Dengan demikian, jika dilihat fenomena pemilihan kepala desa di Desa Sukaluyu, Garut, Jawa Barat kemenangan Asep Kurniawan tidak terlepas dari peran elit yang berpengaruh dalam kontestasi politik tersebut. Seperti apa yang disebutkan oleh Keller sebelumnya bahwa elit politik adalah individu atau kelompok yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik, dan jika dikaitkan dengan elit lokal adalah individu yang berperan penting dalam keputusan politik di tingkat lokal. Penulis melihat di Desa Sukaluyu peran elit sangat signifikan sehingga baik saat pemilihan atau bahkan sesudah pemilihan, elit masih sangat berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan desa di Sukaluyu. Di sini penulis, melihat peran elit agama, sosial, dan ekonomi seperti yang disebutkan sebelumnya memiliki peran kuat dalam mempengaruhi masyarakat Desa Sukaluyu untuk memilih salah satu kandidat kepala desa yaitu Asep Kurniawan.

### **2.2.2. Konsep Relasi Kuasa**

Secara definisi, relasi kuasa adalah hubungan antara satu kelompok dengan kelompok lain berdasarkan ideologi atau kepentingan tertentu.<sup>8</sup> Kekuasaan sendiri diartikan sebagai suatu konsep yang kompleks dan abstrak, yang secara signifikan dapat

---

<sup>8</sup> *Memahami Pemikiran Michel Foucault: Teori Relasi Kuasa*. Dalam Jurnal Sosiologi Info. <https://www.sosiologi.info/2020/07/pemikiran-michel-foucault-teori-relasi-kuasa.html>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2022.

mempengaruhi kehidupan masyarakat. Berdasarkan perspektif Foucault (filsuf strukturalisme), konsep kekuasaan merupakan satu ruang relasi, dimana mereka saling berkaitan karena dimana ada relasi, di situ ada kekuasaan. Kekuasaan menurut Foucault sendiri adalah sebagai pengaruh yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok memaksakan kehendaknya kepada pihak lain.

Kekuasaan harus dipahami sebagai sesuatu yang melancarkan relasi kekuatan dan itu akan membentuk rantai atau sistem dari relasi tersebut sehingga timbul-lah kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat. Foucault dalam Martono membedakan relasi kuasa menjadi tiga bagian, yakni:<sup>9</sup>

1. Relasi kuasa sebagai permainan strategis antara pihak independen. Kekuasaan dalam hal ini hanya melibatkan pihak-pihak yang memiliki kebebasan sehingga tidak terjadi dominasi dalam relasi kekuasaan ini, dan hanya berperan sebagai strategi. Dalam konteks ini, kekuasaan akan menentukan hubungan dalam suatu tindakan.
2. Relasi kekuasaan sebagai dominasi. Dominasi adalah praktik kekuasaan yang mempengaruhi situasi dimana domain pilihan tindakan subjek terbatas. Dominasi yang dimaksud adalah hubungan kekuasaan yang simetris dimana ada masyarakat yang

---

<sup>9</sup> Nanang Martono. 2014. *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, Dan Sekseualitas*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada.

memiliki ruang gerak karena kebebasan bertindak sangat dibatasi karena kekuasaan.

3. Relasi kekuasaan sebagai bentuk pemerintahan, dimana Foucault menjelaskan bahwa konsep pemerintahan terutama berkaitan dengan konsep memimpin, dalam arti mengarahkan dan mengendalikan tindakan. Konsep ini mengacu pada pelaksanaan kekuasaan atas pihak lain, dimulai dari penyelenggaraan pemerintahan yang benar-benar melakukan dominasi dan dapat mewujudkan resiprositas yang menguntungkan.

Dari penjelasan mengenai relasi kuasa tersebut, dapat dikatakan bahwa jabatan dapat memberikan kekuasaan kepada seseorang atau kelompok karena yang bersangkutan menempati kedudukan yang strategis dalam pemerintahan. Semakin tinggi jabatannya, semakin besar pula kekuasaan di tangan orang yang menduduki jabatan tersebut.

Dalam memberikan penjelasan tentang relasi kekuasaan, perlu dilihat bagaimana kekuasaan hadir dalam masyarakat, Coleman menjelaskan bahwa dalam masyarakat terdapat kekuasaan berupa penyerahan individu kepada kelompok dan pengaturan kekuasaan berdasarkan konsensus, sedangkan kendali kekuasaan berasal dari keluarga sendiri.<sup>10</sup> Dalam hal ini, tindakan sosial bukan hanya sekedar

---

<sup>10</sup> James Coleman. 2011. *Pengantar Sosiologi Modern*. Jakarta: Pustaka Media.



transaksi antar individu dalam konteks persaingan atau pasar, individu juga dapat bertindak atas dasar individu lain. Kondisi pertukaran kekuasaan dalam masyarakat akan menimbulkan hubungan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat. Pada saat yang sama, relasi kuasa pasti akan melibatkan struktur masyarakat seperti elit politik lokal yang memiliki kepentingan untuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan dan elit lokal yang dapat mempengaruhi pemerintah setempat dalam membuat kebijakan, di sinilah proses relasi kekuasaan terjadi antara elit lokal dengan pemerintah setempat.

Menurut Vedi Hadiz, relasi kuasa dapat menciptakan oligarki karena ketika dalam prosesnya terjadi pertukaran atau *bergaining* kekuasaan yang dapat menyebabkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dipengaruhi oleh individu atau sekelompok orang.<sup>11</sup> Dalam konteks penelitian ini, pemilihan kepala desa di Sukaluyu dapat menciptakan potensi oligarki yang berasal dari elit lokal karena elit tersebut mendukung secara finansial dalam terpilihnya Akur sebagai Kepala Desa sehingga pertukaran kekuasaan dapat terjadi dan tidak dipungkiri bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah desa terdapat pengaruh dari elit lokal yang mendukungnya saat proses pemilihan.

---

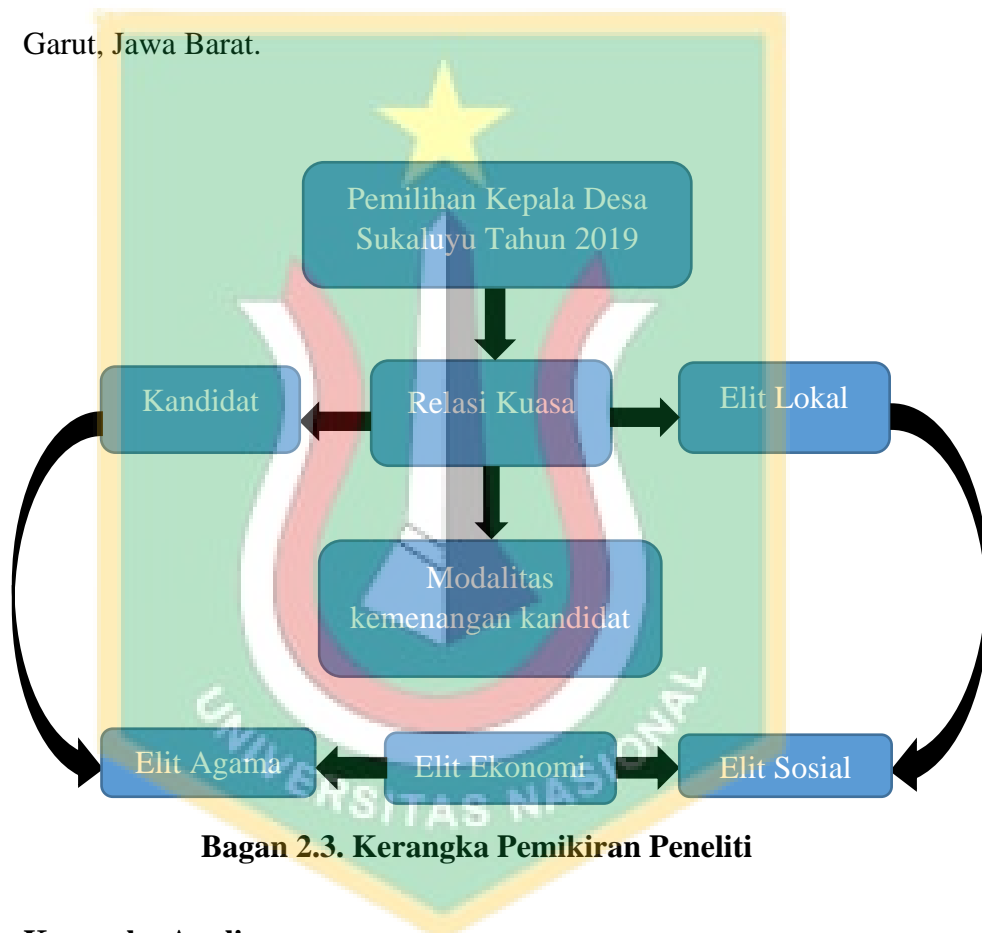
<sup>11</sup> Vedi R. Hadiz. 2005. *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*. Pustaka LP3ES.

Pada penelitian ini, pola relasi kuasa yang menjadi modalitas kemenangan dalam pemilihan kepala desa Sukaluyu, Garut, Jawa Barat tahun 2019 menjelaskan bahwa hubungan elit lokal dengan Asep Kurniawan yang memenangkan Pilkades tersebut merupakan hubungan balas jasa antara elit yang telah mendukung beliau selama proses kampanye pemilihan kepala desa. Relasi kuasa tersebut sangat berpengaruh terhadap pemerintahan desa karena penulis melihat salah satu tokoh yang membantu dalam kemenangan saat Pilkades menduduki jabatan strategis dalam struktur perangkat desa. Selain itu, elit lokal lain yang mendukung Asep Kurniawan dari modal ekonomi atau bahkan sosial juga sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan yang ada di Desa Sukaluyu. Kemudian, relasi kuasa tersebut menjadi modalitas Asep Kurniawan dalam memperoleh kemenangan pada Pemilihan Kepala Desa Sukaluyu Tahun 2019.

### **2.3. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan gambaran alur berpikir peneliti sebagai kelanjutan dari kerangka teori untuk menggambarkan pembahasan, sesuai dengan judul penelitian ini yakni Hubungan Kekuasaan Elit Lokal dan Kandidat Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Sukaluyu Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut Tahun 2019.

Maka dari itu, kerangka pemikiran pada penelitian ini menggunakan indikator teori dari Halim yang mengemukakan bahwa elit lokal terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu elit ekonomi, elit agama, dan elit sosial. Selain itu, terdapat variabel yaitu relasi kuasa yang menjadi modalitas kemenangan Asep Kurniawan dalam kontestasi politik Pemilihan Kepala Desa Sukaluyu, Garut, Jawa Barat.



**Bagan 2.3. Kerangka Pemikiran Peneliti**

#### 2.4. Kerangka Analisa

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki variabel untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu variabel *independent* (bebas) yang dapat mempengaruhi atau penyebab berubahnya variabel terikat dan variabel *dependent* (terikat) yang dapat dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel *independent* (bebas)

adalah relasi kuasa, elit lokal, dan kandidat. Sedangkan, variabel *dependent* (terikat) dalam penelitian ini adalah Pemilihan Kepala Desa.

Peneliti melihat bahwa relasi kuasa, elit lokal, dan kandidat menjadi variabel bebas karena mengunci pada Pemilihan Kepala Desa sebagai variabel terikat. Dalam melihat relasi kuasa yang terjadi pada konteks Pemilihan Kepala Desa membutuhkan data yang peneliti gunakan melalui data primer seperti wawancara dan data sekunder melalui literatur. Pilkades sebagai variabel *dependent* (terikat) akan membuktikan ada tidaknya relasi kuasa yang terjadi antara elit lokal dengan kandidat Kepala Desa Sukaluyu. Terjadinya proses relasi kuasa dalam Pemilihan Kepala Desa di Sukaluyu dikarenakan beberapa faktor yaitu faktor elit lokal yang memiliki modal secara ekonomi dan sosial dalam mendukung salah satu kandidat Kepala Desa di Pilkades Sukaluyu, Garut, Jawa Barat.

**Bagan 2.4. Kerangka Analisa**

